

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batik merupakan salah satu hasil produk budaya Indonesia yang menjadi sorotan dunia, nilai filosofis, perpaduan warna, dan keragamannya menjadikan batik semakin bernilai. Dalam perkembangannya batik terus diperjuangkan untuk menjadi identitas resmi Indonesia yaitu dengan menetapkannya secara legal sebagai budaya asli Indonesia dengan tujuan agar budaya batik tidak diakui negara lain.

Pada tanggal 28 September 2009 UNESCO menyatakan bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Semenjak tanggal 2 Oktober 2009 *United Nations Education Scientific and Culture Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik sebagai salah satu warisan budaya dunia yang dihasilkan oleh Bangsa Indonesia (Herawati, 2010: 12). Kemudian daripada itu, Dewan Kerajinan Dunia (*World Craft Council/WCC*) menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia pada peringatan 50 tahun organisasi tersebut di Dongyang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok pada 18-23 Oktober 2014 (Pradito, 2014).

Banyak warga Yogyakarta menekuni bidang usaha kerajinan batik, ciri khas yang syarat akan budaya para pengerajin mengerjakan buah kerajinan tersebut dengan menggunakan cara-cara tradisional dan sangat teliti. Hanya saja keterbatasan mereka untuk unggul dalam pasar sangat sulit dan skala usaha yang

tergolong UMKM yang mampu memproduksi dengan kekuatan yang kurang optimal, tentunya harga pasar yang tidak bersahabat dan kemunculan pebisnis besar yang ikut menggeluti usaha pada bidang ini.

Potensi identitas Yogyakarta yang kental dengan batik menjadikan banyak pelaku usaha memulai usaha di bidang kerajinan batik dan mereka mampu mengelola dan mengemas produk mereka sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, kemudian permasalahan yang banyak muncul adalah kesulitan pengrajin yang sudah lama menggeluti kerajinan batik dalam mengemas produk mereka yang otentik agar mampu berkembang, maka yang menjadi perhatian adalah peran Pemerintah untuk memberikan solusi kepada para pengrajin batik untuk membantu perkembangan usaha melalui sistem.

Salah satu sistem yang mampu membantu ekonomi secara desentralisasi adalah sistem ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang belandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat. Definisi ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989 adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi rakyat diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.

Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dilakukan sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami kesenjangan pendapatan. Maka dengan adanya program tersebut

dapat menjadi jalan keluar bagi suatu negara memperkecil kesenjangan sosial. Pola pembangunan ekonomi yang telah gagal mendorong para pakar ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum disebut lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Rosmiati, 2014).

Ada tiga indikator yang menunjukkan peran penting Usaha mikro kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. *Pertama*, jumlah UMKM yang banyak dan hampir mencakup semua sektor ekonomi. *Kedua*, UMKM mampu mengurangi pengangguran dengan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. *Ketiga*, UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (Hidayat, 2014). Selain itu, kedudukan UMKM yang menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, dari

segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor UMKM.

Tabel 1.1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Di Indonesia

Tahun	Persentase Penyerapan tenaga kerja
2005	96,85%
2006	97,30%
2007	97,27 %
2008	97,27 %
2009	97,28 %
2010	97,27%
2011	97,24 %
2012	97,16 %
2013	97,23%
2014	97,18%

Sumber : Data Kementerian Koperasi dan UKM Diolah, 2015

UMKM memang berperan untuk menambah lapangan pekerjaan, dimana UMKM dapat menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam usaha mikro yang menyerap hampir mencapai 95% tenaga kerja dari total 97% tenaga kerja sektor UMKM. Namun kondisi penyerapan tenaga kerja ini bersifat tidak stabil bahkan pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kurang berkembangnya UMKM yang disebabkan berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam sektor UMKM, sehingga perkembangan usaha terbatas dan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja akibat pengurangan karyawan (Kemenkop, 2016).

Peran dominan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat Indonesia bergerak di sektor UMKM dimana dampaknya juga terjadi dalam stabilitas kehidupan sosial lainnya. Melihat

pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia telah seharusnya pengembangan UMKM menjadi penting dalam pembahasan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya dibutuhkan kebijakan ekonomi yang memberikan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan seperti UMKM, sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang dalam menciptakan daya saing produksi yang mampu bersaing ditengah arus globalisasi yang deras (Murphi, 2013).

Beberapa tahun belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan dan program dalam upaya pemberdayaan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dalam perekonomian nasional. Langkah-langkah pemerintah dalam program pemberdayaan UMKM ini berdasarkan pada beberapa masalah klasik yang dialami UMKM di Indonesia seperti: kekurangan modal, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pemasaran produk. Dengan melihat permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah melakukan kegiatan pengembangan UMKM dalam bentuk penyediaan modal material, intelektual dan institusional yang diwujudkan dengan penyediaan bantuan modal, pelatihan-pelatihan, fasilitas pemasaran produk, pembinaan/pendampingan usaha dan penyediaan fasilitas pendukung usaha (Pranaputrika, 2015).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai program pengembangan UMKM, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah meneruskan kebijakan tersebut melalui program-program yang mendukung perkembangan UMKM di DIY. Telah

menjadi perhatian khusus Dinas Koperasi dan UMKM dalam lima tahun terakhir terhadap pertumbuhan UMKM.

Dalam pelaksanaan pengembangan sektor UMKM, Pemerintah DIY membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) yang biasa disebut dengan PLUT DIY. PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan berdirinya badan ini sebagai upaya meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM yang berada di DIY (PLUT DIY, 2016).

Maka dalam tujuan terbentuknya PLUT-KUMKM DIY, menjadi badan jasa pemerintah yang melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM yang secara umum hanya bersifat stimulus, dimana jasa atau layanan yang diberikan oleh PLUT DIY kepada UMKM untuk mendorong UMKM meningkatkan kapasitasnya. Dari sejumlah tantangan tersebut, UMKM membutuhkan mitra dalam meningkatkan akselerasi dalam rangka peningkatan daya saing tersebut. Untuk itu adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di seluruh Provinsi yang lahir dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM sangat dibutuhkan. PLUT dibutuhkan sebagai sarana layanan komprehensif bagi pengembangan usaha pelaku Koperasi dan UKM (PLUT DIY, 2016).

Salah satu jenis komoditas yang mengikuti program pendampingan PLUT di Yogyakarta adalah kerajinan batik, batik sendiri sudah menjadi komoditas komersial, nilai budaya dan keunikannya membuat batik mempunyai nilai jual dan permintaan pasar yang potensial. Batik yang mempunyai nilai budaya tersendiri selama berabad-abad sudah dikenal di dunia.

Potensi batik tersebut menjadi latar belakang bagi UMKM dan industri *Start Up* sebagai peluang usaha yang bagus. Akan tetapi strategi pengembangan komoditas batik memiliki banyak tantangan sehingga perlu ada intervensi dalam bentuk pemberdayaan bagi pengusaha yang belum mampu untuk mengembangkan usaha produksi batik. Tidak sedikit pengusaha batik yang mencari pihak ketiga yang mampu membantu mereka dalam memaksimalkan potensi usaha, salah satunya adalah PLUT Dinas UMKM dan Koperasi yang menjadi mediator dan mampu memberikan advokasi.

UMKM mempunyai tantangan yang besar menghadapi persaingan pasar bebas, di sisi lain kesiapan UMKM di Indonesia menjadi permasalahan utama. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurang memiliki jiwa *entrepreneur* yang tinggi, masih kurangnya kemampuan dalam melakukan inovasi untuk mengembangkan produk, keterbatasan modal usaha dan akses modal usaha, sebagian UMKM belum mampu menentukan arah gerak usaha dan capaian dari usaha, serta pengetahuan dan informasi yang terbatas menyebabkan UMKM sulit dalam mengembangkan usaha (Murphi, 2013).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Inggarwati dan Kaudin (2010) yang meneliti tentang peranan faktor-faktor individual dalam mengembangkan usaha (studi kuantitatif pada wirausaha kecil di Salatiga) yang menyatakan bahwa faktor motivasi awal mendirikan usaha, *self-efficacy*, pelatihan, pendampingan (pembinaan dan pemberian motivasi lebih lanjut) mempunyai pengaruh yang nyata dalam perkembangan wirausaha kecil di Salatiga.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alhempri dan Harianto (2013) tentang pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil pada program kemitraan bina lingkungan *Community Development Centre* (CDC) PT. Telkom cabang Pekanbaru, mendapatkan hasil bahwa pelatihan dan pembinaan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pada usaha kecil mitra binaan.

Penelitian Pratama (2013) tentang analisis efektivitas *corporate social responsibility* dalam program kemitraan badan usaha milik negara (studi kasus pada perkembangan UMKM mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII unit usaha Rejosari) yang menggunakan variabel bantuan modal kerja dan dukungan promosi produk untuk pemasaran UMKM mitra binaan yang dilakukan oleh pihak PTPN VII berjalan dengan efektif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM mitra binaan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik, dkk (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

pengembangan klaser UMKM alas kaki di Kota Bogor, aspek finansial berupa penguatan modal dari dana bantuan mempunyai pengaruh yang sangat kecil. Untuk aspek non finansial berupa pemasaran pelatihan dan dukungan pendampingan tidak berpengaruh terhadap pengembangan klaser UMKM alas kaki di Kota Bogor.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam perkembangan UMKM di DIY tersebut agar dapat diketahui secara nyata apa saja yang mempunyai pengaruh dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan UMKM di DIY. Lebih lanjut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Analisis Determinan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan di Yogyakarta (Studi pada Kerajinan Batik Binaan PLUT DIY)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

- A.** Pembahasan ditekankan pada UMKM yang mengikuti program pemberdayaan UMKM yang dilakukan PLUT, Dinas Koperasi dan UMKM DIY.
- B.** Mengingat banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM di DIY yang mengikuti program pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan sampel UMKM kerajinan batik yang mengikuti program pemberdayaan dari PLUT.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membagi permasalahan kedalam beberapa pertanyaan seperti berikut ini:

1. Apakah akses modal berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY?
2. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY?
3. Apakah Pemasaran berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY?
4. Apakah pendampingan program berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY?
5. Apakah Akses modal, pelatihan, pemasaran, pendampingan usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui determinan perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY.
2. Mengetahui bagaimana program pemberdayaan PLUT melalui bantuan akses modal, pelatihan, pemasaran, pendampingan usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang memproduksi komoditas kerajinan batik di DIY.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan dan implementasi teori-teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai kondisi perekonomian khususnya pengembangan UMKM di DIY
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai analisa bahan masukan menentukan arah kebijakan pemerintah terhadap Kesesuaian antara Kebijakan dengan Pelaksanaan Pengembangan UMKM di DIY.